

# PENYESUAIAN IMIGRASI TERKAIT PERALIHAN STATUS PANDEMI KE ENDEMI TERHADAP WARGA NEGARA ASING

(Studi Kasus Kantor Imigrasi Kelas I Kota Malang)

P-ISSN 2622-4828 E-ISSN 2774-9592

<https://journal.poltekim.ac.id/jikk/article/view/xxx>

## IMMIGRATION OFFICE CLASS I CHECKPOINT YOGYAKARTA

P-ISSN 2622-4828 E-ISSN 2774-9592

<https://journal.poltekim.ac.id/jikk/article/view/387>

DOI: 10.52617/jikk.v6i1.387

Muhammad Ardiansyah Pratama

[Pratamaardiansyah32@gmail.com](mailto:Pratamaardiansyah32@gmail.com)  
Universitas Muhammadiyah Malang

M.Syaprin Zahidi

[syaprin123@umm.ac.id](mailto:syaprin123@umm.ac.id)  
Universitas Muhammadiyah Malang

### ABSTRAK

*Kemunculan isu Covid-19 menjadi titik utama dari segala perubahan dan penyesuaian yang terjadi di segala dimensi baik di level negara ataupun individu, salah satunya adalah instansi negara yaitu imigrasi. Covid-19 mengharuskan keimigrasian di seluruh negara untuk menyesuaikan diri dengan keadaan yang terjadi terutama kepada lalu lintas warga negara asing baik yang ingin menetap ataupun pulang ke negara mereka. Banyak peraturan yang kemudian dikeluarkan oleh pemerintah negara salah satunya Indonesia. Seiring berjalannya waktu status pandemic beralih status menjadi endemic yang berarti terdapat penyesuaian kebijakan baru terhadap para warga asing. Penelitian ini akan menggunakan metode komparasi guna mengkomparasikan kebijakan ketika terjadi peralihan status dari pandemic menuju endemic dengan studi kasus pada kantor imigrasi kelas I di kota Malang.*

*Kata kunci : Endemi, Imigrasi, Penyesuaian, Pandemi, Warga Asing*

### ABSTRACT

*The emergence of the Covid-19 issue has become the main point of all changes and adjustments that occur in all dimensions, both at the state and individual levels, one of which is the state agency, namely immigration. traffic of foreign nationals who want to stay or return to their country. Many regulations were later issued by the government of one country, one of which was Indonesia. Over time, the status of the pandemic changed to endemic, which meant that there were new policy adjustments for foreigners. This study will use the comparative method to compare*



*policies when there is a status transition from pandemic to endemic with a case study at a class I immigration office in the city of Malang.*

*Keywords: Endemic, Immigration, Adjustment, Pandemic, Foreign Residents*

## PENDAHULUAN

Tahun 2019 menjadi sebuah tahun yang berat bagi masyarakat global karena pada tahun inilah muncul wabah Covid-19 yang mewabah keseluruh dunia tak terkecuali Indonesia. Kondisi geografi Indonesia yang berbentuk kepulauan ditambah dengan populasi penduduk yang menduduki peringkat 5 besar di dunia menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi Indonesia guna menangani penyebaran Covid-19 (Roziqin, Mas'udi, and Sihidi 2021). Pemerintah daerah maupun provinsi telah melakukan berbagai upaya dalam menanggulangi pandemic Covid-19 ini. Langkah awal yang dilakukan pemerintah adalah dengan mengeluarkan banyak kebijakan yang bertujuan untuk dapat meminimalisir penyebaran virus yang semakin meluas. Kebijakan yang dikeluarkan seputar kesehatan yaitu dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada setiap masyarakat dan *Physical Distancing* pada setiap individu. Bentuk antisipasi dan upaya yang dilakukan untuk mengurangi perluasan virus Covid-19 di setiap daerah di Indonesia yaitu dengan pembatasan kegiatan di luar rumah. Seperti dengan diberlakukannya *study from home* bagi pelajar dan *work from home* bagi pekerja, bahkan kegiatan beribadah pun dilaksanakan di rumah (Darmawan and Atmojo 2020).

Seluruh lembaga di Indonesia diwajibkan agar mematuhi protocol kesehatan yang telah ditetapkan, beberapa lembaga negara yang juga menjadi sangat terdampak selain di bidang medis adalah imigrasi. Imigrasi layaknya sebuah gerbang suatu negara yang mengatur segala hal ihwal terkait keluar masuknya warga negara baik Indonesia maupun warga negara asing sehingga imigrasi menjadi sebuah lembaga penting guna menjaga kedaulatan negara<sup>1</sup>. Dampak yang dirasakan oleh badan imigrasi Indonesia lebih kepada lalu lintas terhadap warga negara asing yang masih berada di Indonesia ketika diterbitkannya kebijakan untuk *lockdown*. Hal tersebut kemudian direspon dengan dibuatnya kebijakan terkait HAM karena kantor imigrasi berada dalam payung kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia<sup>2</sup>. Penyebaran covid-19 yang begitu cepat dan secara tiba-tiba membuat perlu adanya revisi terkait kebijakan yang dikeluarkan terkait penanganan covid-19 salah satunya dengan larangan untuk masuk ataupun keluar dari Indonesia baik warga negara Indonesia maupun asing.

Seiring berjalannya waktu dan penyesuaian yang dilakukan ketika *lockdown* di Indonesia hal tersebut berhasil membuahkan hasil yakni dengan diterbitkannya peraturan *new normal*, kebijakan *new normal* ini hadir sebagai bentuk adaptasi terkait kasus covid-19 di Indonesia yang mana masyarakat mulai diperbolehkan untuk beraktivitas seperti biasa namun masih tetap menjalankan protokol kesehatan sebagaimana mestinya (Sparrow, Dartanto, and Hartwig 2020).

<sup>1</sup> <https://www.imigrasi.go.id/id/profil-tugas-fungsi-kedudukan-tugas-dan-fungsi/>

<sup>2</sup> <https://peraturan.bpk.go.id/>

Hingga kemudian protokol *new normal* ini membuah hasil dan diiringi dengan mayoritas masyarakat yang telah menerima vaksin kemudian status pandemic mulai bergeser dan mempersiapkan menuju status endemic.

Tujuan dari jurnal ini adalah untuk melihat penyesuaian kebijakan yang terjadi di ranah keimigrasian sebagai bentuk terhadap respon perubahan status pandemic ke endemic. Perubahan kebijakan tidak hanya terjadi sekali namun memerlukan beberapa kali perubahan hingga dirasa sesuai dengan kondisi yang terjadi.

Pembahasan jurnal ini akan dimulai dengan penjelasan mengenai teori yang dipakai yakni intermestik, kemudian memasuki pembahasan yang dimulai dengan menjabarkan bagaimana kondisi keimigrasian di Indonesia selama Covid-19 dilanjutkan dengan kondisi keimigrasian di Negara Negara lain selama pandemic covid-19 dan kemudian melakukan pembahasan mengenai penyesuaian yang dilakukan oleh keimigrasian Indonesia dalam menyikapi perubahan status pandemic ke endemic.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu dengan topic keimigrasian ketika masa pandemic namun dikarenakan tidak ada kemiripan dalam penggunaan teori intermestik maka penulis akan menyortir penelitian terdahulu menggunakan kata kunci kebijakan keimigrasian ketika masa pandemic dan berhasil menemukan 3 penelitian. Yang pertama adalah **“POLEMIK KEIMIGRASIAN INDONESIA SELAMA PANDEMI”** (Siswatinigrum and Saniyah 2021) yang ditulis oleh Etik Siswatinigrum, dalam artikel ini penulis membahas mengenai hal ihwal yang terjadi pada keimigrasian Indonesia pada masa Covid-19. Penulis kemudian membahas mengenai kebijakan terkait keimigrasian Indonesia pada masa covid-19 hal ini meliputi pembuatan visa dan izin tinggal kepada warga asing yang pada masa covid-19 masih menetap di Indonesia dan tidak bisa kembali ke Negara mereka dikarenakan diterapkannya kebijakan *Lockdown* oleh Presiden Jokowi. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah adanya kebijakan khusus yang dibuat pada masa covid-19 untuk menyesuaikan dengan kebijakan kebijakan domestic lainnya seperti *lockdown*. Perbedaannya adalah pada penelitian tersebut terfokuskan keimigrasian pada masa pandemic covid-19 saja belum mencapai pada perubahan status endemic.

Penelitian yang kedua adalah **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGAWASAN KEIMIGRASIAN TERHADAP ORANG ASING DI KANTOR IMIGRASI MALANG PADA MASA PANDEMI COVID-19”** (Covid- 2021) ditulis oleh Muhammad Mufli Syahjehan, penelitian ini berfokus pada kebijakan keimigrasian terkait pengawasan terhadap warga Negara asing yang terkhususkan di daerah Malang. Kebijakan ini muncul pada masa covid-19 yang diharapkan dapat membantu memberikan sebuah hasil terkait kontrol penyebaran covid-19. Pada penelitian ini disebutkan bahwasannya pengawasan ini menjadi sebuah tindakan yang tepat selain dalam mencegah penyebaran virus covid-19 namun juga berguna untuk menjaga kedaulatan Negara karena menurut penelitian tersebut masih banyak warga asing yang melanggar protocol-protokol kesehatan dan kurangnya sumber daya manusia yang di miliki di kantor imigrasi wilayah Malang. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini berada di kebijakan yang diterapkan ketika masa pandemic covid-19, perbedaannya adalah kebijakan pengawasan yang dilakukan pada

masa covid-19 mengalami perubahan ketika memasuki transisi ke status endemic dan hal tersebut tidak dibahas dalam penelitian tersebut.

Penelitian yang terakhir adalah “**KEBIJAKAN *SELECTIVE* DI BIDANG KEIMIGRASIAN MENGHADAPI GLOBAL COVID-19**” (Widyanto and Ardyaningtyas 2020) yang ditulis oleh Guntur Widyanto, penelitian ini mengangkat terkait pemilihan kebijakan yang akan diterapkan oleh badan keimigrasian Indonesia dalam masa pandemic covid-19. Pemilihan ini dimulai dari penetapan peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia no.3 tahun 2020, hingga pada peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia no.11 tahun 2020. Penelitian ini memfokuskan bagaimana imigrasi menjalankan tugasnya dalam mengatur lalu lintas warga Negara asing yang sedang terjebak dan tidak bisa kembali ke Negara mereka. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pihak keimigrasian. Perbedaannya adalah dalam jangka waktunya yang mana pada penelitian tersebut membahas pada masa pandemic covid-19.

## **METODE**

Penelitian ini akan menggunakan metode komparasi, dengan focus untuk melihat bagaimana kebijakan yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan diterapkan di keimigrasian pada masa transisi pandemic ke endemi. (Darmawan and Atmojo 2020)

Penelitian ini akan menggunakan teori Intermestik, intermestik adalah penggabungan antara internasional dan domestic, teori ini memberikan penjelasan mengenai bahwasannya apa yang terjadi di dunia internasional bisa mempengaruhi dunia domestic atau nasional dan sebaliknya isu domestic bisa saja menjadi sebuah isu internasional (Kurniawati 2012). Teori ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1970 oleh Henry Kissinger yang pada masa itu implikasi terhadap isu-isu internasional. Dalam ilmu hubungan Internasional intermestik ini masih menjadi ilmu baru yang digunakan sebagai alternative penelitian agar lebih mudah untuk menganalisis suatu isu yang bersifat transnasional (Intervensi et al. 2022).

## **PEMBAHASAN**

### **Pengaruh pandemic covid-19 terhadap keimigrasian Indonesia**

Keimigrasian Indonesia menjadi salah satu instansi pemerintah yang memiliki peranan penting dalam menjaga kedaulatan Negara, karena imigrasi selayaknya sebuah pintu masuk sekaligus pintu keluar bagi seluruh warga yang berada di Negara tersebut terlepas baik warga Negara Indonesia itu sendiri maupun warga Negara asing (Kusumawardani 2020). Indonesia sendiri memiliki sejarah yang cukup kompleks apabila membicarakan tentang lalu lintas manusia terutama warga Negara asing, hal ini kemudian mendapatkan korelasi mengenai posisi geografi Indonesia yang berada dekat dengan Australia yang menjadi Negara yang meratifikasi konvensi tentang perlindungan terhadap pengungsi sehingga banyak pengungsi dari luar Indonesia datang ke Indonesia hanya untuk sekedar transit (Intervensi et al. 2022) hal ini kemudian melibatkan

badan keimigrasian guna membantu penetapan status kepada para pengungsi yang melakukan transit di Indonesia.

Berikut adalah data akumulasi terkait warga Negara asing yang mengurus izin tinggal di Indonesia dalam jangka waktu awal tahun 2020 hingga September 2022

2020

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec
189	115	199	57	0	4	76	119	107	106	103	87

Table 1.0 Data permohonan WNA 2020 di Kantor Imigrasi kelas I diambil dari berkas rekap tahunan

Pada tabel diatas adalah data warga Negara asing yang mengajukan izin tinggal ke kantor TPI kelas I Malang,pada bulan Mei menandakan penurunan secara drastis yang diakibatkan oleh penerapan kebijakan *lockdown* yang kemudian pada bulan Juli mulai mengalami penambahan yang disebabkan oleh mulai dibukanya permohonan izin tinggal secara online<sup>3</sup>.Kemudian pada akhir tahun mulai terjadi penurunan yang disebabkan oleh kenaikan kasus covid-19 di Indonesia sehingga *lockdown* semakin diperketat dari sebelumnya.

2021

Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec
83	76	60	68	39	50	57	103	85	58	43	49

Table 1.1 Data permohonan WNA 2021 di Kantor Imigrasi kelas I diambil dari berkas rekap tahunan

Pada table 1.1 melanjutkan pengetatan *lockdown* hingga pada pertengahan tahun 2021 dan hingga pada penghujung akhir 2021 kasus covid di Indonesia mengalami naik turun akan tetapi tidak sampai di titik aman.

2022

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sept
60	83	79	77	82	84	173	149	112

Table 1.2 Data permohonan WNA 2022 di Kantor Imigrasi kelas I diambil dari berkas rekap tahunan

Pada Tabel 1.2 mulai terjadi peningkatan di pertengahan tahun disebabkan mulai adanya informasi terkait penyesuaian untuk menghadapi peralihan status pandemic ke endemic,status endemic ini dimaksudkan bahwasannya masyarakat Indonesia sudah bisa ‘berdamai’ dengan covid-19.

### Penyesuaian kebijakan terkait status endemic

<sup>3</sup> Permohonan Online Imigrasi  
<https://izintinggal-online.imigrasi.go.id/>

Keimigrasian Indonesia banyak melakukan penyesuaian terkait kemunculan covid-19 pada tahun 2020 silam, hal ini kemudian menjadi sebuah hambatan tersendiri mengenai kebijakan yang harus diambil oleh pemerintah, karena pada saat covid-19 tiba di Indonesia Presiden Jokowi mulai memberlakukan *lockdown* atau PSBB dengan skala nasional yang berarti tidak ada yang boleh masuk maupun keluar dari Indonesia guna mengontrol penyebaran virus covid-19 (Yunus and Rezki 2020).

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penghentian Sementara Bebas Visa Kunjungan, Visa, dan Pemberian Izin tinggal Keadaan Terpaksa Bagi Warga Negara Republik Rakyat Tiongkok. Peraturan ini pertama kali diterbitkan dan diberlakukan sejak 5 februari 2020. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 tentang Pembatasan Aktivitas Perlintasan Orang Asing Untuk Keluar dan Masuk Wilayah Indonesia dikarenakan peningkatan jumlah korban yang terjangkit Covid-19 yang terus meningkat. Namun hanya orang asing yang khusus berasal dari Negara Republik Rakyat Tiongkok saja yang dibatasi baik penggunaan visa maupun izin tinggal.

Setelah itu Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 digantikan oleh Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal Dalam Upaya Mencegahnya Masuk Virus Corona yang diterbitkan di Jakarta pada 28 Februari 2020. Sedikit berbeda dengan peraturan sebelumnya, pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2020 ini banyak mengatur tentang tata aturan keluar dan masuk Orang Asing yang berasal dari Republik Rakyat Tiongkok serta Izin Tinggal Orang Asing yang selama ini berada di Indonesia.

Kemudian, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2020 diganti dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penghentian Sementara Bebas Visa Kunjungan dan Visa Kunjungan Saat Kedatangan serta Pemberian Izin Tinggal Keadaan Terpaksa pada 19 Maret 2020. Peraturan ini menjelaskan bahwa tidak hanya Orang Asing yang berasal dari Tiongkok saja yang, namun semua Orang Asing yang melakukan aktivitas perlintasan di wilayah Indonesia juga dibatasi. Penghentian Orang Asing yang hendak masuk ke Indonesia pun dengan menggunakan Bebas Visa Kunjungan maupun Visa Kunjungan saat kedatangan serta pemberlakuannya Izin Tinggal Dalam Keadaan Terpaksa bagi seluruh Orang Asing. Kebijakan tersebut kemudian menjadi patokan untuk menghadapi atau menyambut status endemic

## KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwasanya kejadian pada skala global juga dapat memberikan efek yang signifikan terhadap kebijakan domestic, kasus covid-19 yang sebelumnya diperkirakan tidak akan memasuki Indonesia kemudian mematahkan hal tersebut yang kemudian merubah segala aspek dimensi yang ada di Indonesia. Perlunya *trial and error* pada kebijakan juga digunakan sebagai bentuk adaptif terhadap keadaan yang sedang melanda Indonesia hal ini dapat dilihat dari banyaknya perubahan dan penyesuaian yang terjadi pada penerapan kebijakan terhadap warga asing yang menetap di Indonesia. Pengambilan keputusan di tiap Negara terkait bidang keimigrasian tentu memiliki perbedaan namun dengan kesamaan yakni untuk tidak membuka *border* hingga kasus covid-19 mereda yang pada akhirnya mengakibatkan status *overstay* pada

warga asing yang berada di Indonesia. Pemanfaatan teknologi virtual dalam pelayanan imigrasi juga membantu masyarakat Indonesia guna mematuhi protocol kesehatan yakni *social distancing*.

Perubahan status ke endemic bukan berarti secara serentak menghilangkan protocol kesehatan dan kebijakan terkait hal tersebut namun haruslah dibuat kebijakan yang sesuai untuk kondisi endemic di Indonesia, karena pada akhirnya kebijakan-kebijakan ini memiliki karakteristik kondisional guna untuk menyesuaikan diri dengan situasi di masing-masing Negara. Penyesuaian yang dilakukan juga tidak lepas dari kepentingan-kepentingan yang ingin dicapai oleh Indonesia sendiri salah satunya adalah untuk memulihkan perekonomian yang sumber utama mereka berasal dari warga Negara asing yang melakukan kunjungan atau berlibur ke Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Darmawan, Eki, and Muhammad Eko Atmojo. 2020. "Kebijakan Work From Home Bagi Aparatur Sipil Negara Di Masa Pandemi Covid-19." *The Journalish: Social and Government* 1(3):92–99. doi: 10.55314/tsg.v1i3.26.
- Intervensi, Jurnal, Pembangunan Jisp, Winda Rahmadhani Purwanti, M. Syaprin Zahidi, and Mochd Agoes Aufiya. 2022. "Pengawasan Keimigrasian Terhadap Pengungsi Luar Negeri Di Indonesia Dalam Implementasi Peraturan Presiden No Immigration Supervision of Overseas Refugees in Indonesia in the Implementation of Presidential Regulation No . 125 Of." 3(125):119–29.
- Kurniawati, Dyah Estu. 2012. "PENDEKATAN INTERMESTIK DALAM PROSES PERUBAHAN KEBIJAKAN: SEBUAH REVIEW METODOLOGIS Dyah Estu Kurniawati." *Pendekatan Intermestik Dalam Proses Perubahan Kebijakan: Sebuah Review Metodologis* 154–66.
- Kusumawardani, Desinta Wahyu. 2020. "Menjaga Pintu Gerbang Negara Melalui Pembatasan Kunjungan Warga Negara Asing Dalam Mencegah Penyebaran COVID-19." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14(3):517. doi: 10.30641/kebijakan.2020.v14.517-538.
- Roziqin, Ali, Syasya Y. F. Mas'udi, and Iradhad T. Sihidi. 2021. "An Analysis of Indonesian Government Policies against COVID-19." *Public Administration and Policy* 24(1):92–107. doi: 10.1108/PAP-08-2020-0039.
- Siswatiningrum, Etik, and Idah Saniyah. 2021. "Polemik Keimigrasian Indonesia Selama Pandemi Covid-19." *Journal of International Relation (JoS) | 1(September 2021):1–9.*
- Sparrow, Robert, Teguh Dartanto, and Renate Hartwig. 2020. "Indonesia Under the New Normal: Challenges and the Way Ahead." *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 56(3):269–99. doi: 10.1080/00074918.2020.1854079.
- Widyanto, Guntur, and Riri Ardyaningtyas. 2020. "Selective Policy in Immigration to Facing Global Pandemic COVID-19." *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian* 3(2):51–60. doi: 10.52617/jikk.v3i2.118.
- Yunus, Nur Rohim, and Annissa Rezki. 2020. "Kebijakan Pemberlakuan Lock Down Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 7(3). doi: 10.15408/sjsbs.v7i3.15083.